EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KOTA BAUBAU

Arinda*¹, Dewi Mahmuda²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: arindawakatobi05@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah kota Baubau. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Kantor BPKAPD Kota Baubau, yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kota Baubau sudah menerapkan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah(SAP) berbasis akrual. Hal ini berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan dalam mengevaluasi mengenai Makna Basis Akrual dalam Pemerintah Kota Baubau tentang kompleksitas laporan keuangan, Perlakuan Akuntansi pada LKPD Kota Baubau Tahun Anggaran 2019-2020 Terkait Penerapan PP 71/2010 Basis Akrual dan penyajian laporan keuangan Kota Baubau berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Basis Akrual, Pemerintah Daerah Kota Baubau

ABSTRACT

This study aims to find out how to apply accrual-based government accounting standards to the Baubau city government. The research method used is descriptive qualitative. The data collection method used in this study was observation, interviews and documentation. The research was conducted at the BPKAPD Office in Baubau City, which is in Southeast Sulawesi Province. The results of the study show that the Baubau City Government has implemented Government Regulation Number 71 of 2010 concerning accrual-based Government Accounting Standards (SAP). This is based on the results of the analysis that has been carried out in evaluating the Meaning of the Accrual Basis in the Baubau City Government regarding the complexity of financial reports, Accounting Treatment in the Baubau City LKPD for the 2019-2020 Fiscal Year Related to the Implementation of PP 71/2010 Accrual Basis and the presentation of Baubau City financial reports based on Government regulation Number 71 of 2010.

Keywords: Government Accounting Standards, Accrual Basis, Local Government Of Baubau City

1. PENDAHULUAN

Penggunaan akuntansi berbasis akrual sejatinya bukanlah sesuatu yang baru dalam sektor pemerintahan. Pada awal tahun 1990-an telah muncul laporan keuangan dan anggaran

berbasis akrual yang pertama kalinya di dunia yaitu di New Zealand. Yang kemudian dalam perkembangan satu dekade berikutnya, telah terjadi perubahan besar dalam penggunaan basis akuntansi dari basis kas menuju menjadi basis akrual di negara-negara anggota OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development). Namun di Indonesia sendiri akuntansi berbasis akrual baru mulai dicanangkan setelah terbitnya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 36 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 70 ayat (2) yang mengamankan pemerintah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Kedua undang-undang tersebut diperkuat setelah munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang kemudian diganti dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah (SAP). Namun penerapan akuntansi berbasis akrual pada seluruh entitas pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Indonesia baru berjalan pada tahun 2015.

Dalam sistem pengelolaan keuangan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, dengan tuntutan akan peningkatan kualitas laporan keuangan demi terjadinya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai penyesuaian penata usahaan dilakukan demi mendukung perubahan tersebut. Salah satu kunci perubahan tersebut adalah dikembangkannya kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Di Indonesia sendiri perjalanan akuntansi akrual mengalami berbagai macam perubahan. Di mulai dari munculnya PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yang berarti penerapan basis kas untuk pendapatan dan belanja serta basis akrual untuk aset, kewajiban dan ekuitas. Munculnya PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengamankan penerapan akuntansi berbasis akrual secara menyeluruh. Penerapan tersebut selambat-lambatnya di laksanakan pada tahun 2015 namun di Indonesia hingga tahun ini di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah penerapan akuntansi berbasis akrual bukan tanpa masalah. Hasil pemeriksaan kinerja oleh BPK pada level pemerintah pusat di tahun 2014 semester II, menjelaskan bahwa pemerintah pusat belum sepenuhnya efektif untuk mendukung penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Permasalahan terjadi pada level pemerintah daerah yaitu pada semester I tahun 2014 BPK melakukan pemeriksaan pada 184 Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang hasilnya menunjukkan ketidak siapan pemerinah daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Yang dimana permasalahan yang muncul pun sangat beragam yang diantaranya berupa, pemerintah daerah yang belum mempersiapkan SDM yang kompeten, belum dilakukannya pelatihan dan sosialisasi mengenai PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara intensif, struktur organisasi yang belum mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual, belum adanya kebijakan dari pemerintah daerah terkait sistem akuntansi berbasis akrual, belum adanya alokasi anggaran secara khusus unntuk persiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang belum terintegrasi antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan belum adanya rencana dari pemerintah untuk mengembangkan aplikasi/sistem pengelolaan keuangan yang berbasis akrual.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

2.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan kuangan pemerintah. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli untuk bentuk formal, perioditas, konsisten pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar.

Menurut Bastian (2010) Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia.

2.1.2 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan pemerintah yakni basis akrual, sehingga dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan entitas Pelaporan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Entitas Pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual menyaji-kan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan tentang anggran (Firdaus, 2015).

2.2 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

2.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Berbasis Akrua

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa :

Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Menurut Roring (2019) Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas di terima atau dibayarkan.

2.2.2 Manfaat Akuntansi Berbasis Akrua

Secara umum, pemerintah Indonesia menerapkan basis akuntansi akrual karena basis akrual memiliki manfaat sebagai berikut (Anonim, 2014) :

- a. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.
- b. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah.
- c. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

2.2.3 Kendala Penerapan Basis Akrua

Untuk konteks di Indonesia Ritonga (Astuti, 2017) mengatakan bahwa untuk mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan kondisi-kondisi yang mendukung, sekaligus menjadi permasalahan yang dihadapi saat ini, adalah sebagai berikut:

- a. Dukungan SDM yang berkompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan.
- b. Dukungan dari pemeriksa laporan keuangan, karena perubahan basis akuntansi akan mengubah cara pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Perubahan-perubahan yang terjadi harus melalui pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk itu, proses baku penyusunan di dalam penyusunan suatu standar akuntansi, termasuk untuk menerapkan basis akuntansi, harus dilaksanakan dengan baik dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, agar standar yang dihasilkan lebih berkualitas.
- c. Tersedianya sistem teknologi informasi yang mampu mengakomodasi persyaratan-persyaratan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.

- d. Adanya system penganggaran berbasis akrual, karena jika anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaannya masih basis kas sedangkan realisasinya berbasis akrual, maka antara anggaran dan realisasinya tidak dapat dibandingkan.
- e. Dari kendala-kendala diatas memunculkan persyaratan, yaitu harus ada komitmen dan dukungan politik dari para pengambil keputusan dalam pemerintahan, karena upaya penerapan basis akrual memerlukan dana yang besar dan waktu yang panjang.

2.2.4 Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrual

Untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual agar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka diperlukan sebuah strategi dan rencana kerja untuk memandu pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, KSAP mencoba untuk menyusun rencana strategi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Strategi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.3 Strategi penerapan SAP Berbasis Akrual

Tahun	Agenda
2010	<ol style="list-style-type: none">1. Penerbitan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual2. Mengembangkan kerangka kerja akuntansi berbasis akrual3. Sosialisasi SAP berbasis akrual
2011	<ol style="list-style-type: none">1. Penyiapan aturan pelaksana dan kebijakan akuntansi2. Pengembangan sistem akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan <i>detail requirement</i>)3. Pengembangan kapasitas SDM
2012	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan sistem akuntansi dan TI (lanjutan)2. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2013	<ol style="list-style-type: none">1. Piloting kementerian/lembaga dan bendahara umum Negara2. Review, evaluasi dan penyempurnaan system3. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2014	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Parallel</i> rundan konsolidasi seluruh Lk2. <i>Review</i>, evaluasi dan penyempurnaan system3. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015	<ol style="list-style-type: none">1. Implementasi penuh2. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

Sumber: KSAP 2011.

3 METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Silaen, 2018) populasi adalah keseluruhan dari objek atau individu yang memiliki karakteristik (sifat-sifat) tertentu yang diteliti. Dalam penelitian ini, populasi penelitian mengacu pada staf bagian akuntansi dan staf bagian keuangan pada BPKAPD Kota Baubau.

3.2.2 Sampel

Menurut Arfan Ikhsan dkk (2014) “Sampel adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut”. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah seluruh kariawan di BPKAPD Kota Baubau.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah: Data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka (*numeric*) yang diperoleh dari objek penelitian dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan.

3.2.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode observasi. Wawancara dan dokumentasi.

3.4 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Makna Basis Akrual dalam Pemerintah Kota Baubau: Kompleksitas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Baubau (dalam hal ini BPKAPD) melakukan pelaporan keuangan satu tahun sekali yang diterbitkan paling lambat tanggal 10 Januari. BPKAPD membentuk tim laporan keuangan dari bidang akuntansi sebagai tim konsolidasi.

Data yang dikumpulkan peneliti melalui wawancara dengan informan, yaitu Bapak Muh. Budiman Undu, Sp selaku kepala sub bidang pelaporan dan pembinaan pada Badan Pengelolah Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah menyatakan bahwa:

“Pemerintah Kota Baubau telah menerapkan SAP berbasis akrual sejak tahun 2015, sesuai dengan peraturan dalam perundang-undangan. Dimana sebelum menggunakan SAP basis akrual mereka hanya menyajikan 5 komponen laporan keuangan setelah menerapkan SAP pemerintah Kota Baubau telah menerapkan 7 komponen laporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah”.

Tujuh komponen laporan yang dimaksud yaitu: laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan ekuitas (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Dimana Kota Baubau telah mematuhi paraturan pemerintah yang disebutkan dalam Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Untuk manfaatnya sendiri Bapak Budiman menyatakakan bahwa: *“Harusnya dengan diterapkanya SAP berbasis akrual, menjadikan laporan keuangan daerah maupun pusat menjadi lebih informatif. Dengan diterapkanya 7 komponen ini bermanfaat juga dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan”.* (Senin, 18 Oktober 2021 Pukul 09:30)

Sedangkan mengenai kendala penerapan SAP berbasis akrual dan sarana yang disediakan oleh instansi terkait penerapan SAP berbasis akrual Bapak Budiman mengatakan bahwa:

“Sampai saat ini sudah tidak ada lagi kendala dalam penerapan SAP berbasis akrual dan dengan adanya penggunaan aplikasi SIMDA, aplikasi tersebut digunakan dari penganggaran sampai kepelaporan”. (Senin, 18 Oktober 2021 Pukul 09:30)

Untuk opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah, beliau menyatakan bahwa:

“Kota Baubau mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian 6 kali berturut-turut dari tahun 2015 sampai tahun 2020”. (Senin, 18 Oktober 2021 Pukul 09:30)

Dimana ditahun tersebut Kota Baubau telah menerapkan SAP basis akrual, dapat dikatakan Kota Baubau telah berhasil dalam pengimplementasian basis akrual.

4.1.2 Analisis Perlakuan Akuntansi pada LKPD Kota Baubau Tahun Anggaran 2019-2020 Terkait Penerapan PP 71/2010 Basis Akrua: Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan dalam penerapan SAP Akrua

1. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Kota Baubau

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Budiman, selaku Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pembinaan pada BPKAPD Kota Baubau menjelaskan bahwa:

“Untuk pencatatan pendapatan-LRA pada laporan keuangan kota baubau disusun dengan menggunakan basis kas sementara itu pencatatan pendapatan-LO disusun menggunakan basis akrua. Untuk pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima, baik kas itu diterima di kasda maupun kas diterima di Bendahara. Sedangkan untuk pendapatan-LO, ketika Pemda Kota Baubau mempunyai hak. untuk pengakuan dan pengukuran dalam pencatatan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO. Kota Baubau telah mencatat sesuai dengan aturan yang ditulis dalam PSAP”.

Sedangkan untuk pengukurannya, ketika diberikan pertanyaan yang mengenai pengukuran pendapatan-LRA dan pendapatan-LO, Bapak Budiman menjelaskan bahwa:

“Untuk pengukuran pendapatan-LRA dan pendapatan-LO sama dengan di PSAP dimana dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)”.

2. Pengakuan dan Pengukuran Belanja Daerah Kota Baubau

Bapak Budiman menjelaskan bahwa:

“Belanja daerah Kota Baubau menggunakan basis kas. Pada Pemda Baubau belanja diakui pada saat uang keluar dari Kasda. hal tersebut sudah sesuai dengan PSAP, jika belanja memakai basis kas, kas berbeda dengan beban daerah Kota Baubau yang menggunakan basis akrua. kalau di akuntansi komersil ada biaya sedangkan kalau di akuntansi pemerintah hanya mengenal belanja daerah dan beban daerah. Itu merupakan perbedaan yang mendasar di akuntansi pemerintah dengan akuntansi komersil”.

Untuk pengukurannya Bapak Budiman menjelaskan bahwa:

“Pengukuran belanja berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah”.

3. Pengakuan dan Pengukuran Beban Daerah Kota Baubau

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Budiman bahwa:

“Beban daerah Kota Baubau memakai basis akrua, beban diakui ketika timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa”.

Sesuai dengan pernyataan dari Bapak Budiman untuk beban penyusutan sendiri ada tiga metode yang bisa dilakukan, yaitu : metode garis lurus, metode saldo menurun ganda dan metode unit produksi. Menurut beliau:

“Karena ada pilihan untuk menggunakan metode yang mana, kami memilih metode garis lurus karena dinilai paling mudah diantara yang lain”.

4. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Daerah Kota Baubau

Ketika ditanyakan mengenai bagaimana pengakuan dan pengukuran pembiayaan di Pemerintah Kota Baubau, Bapak Budiman menjawab bahwa:

“Untuk pembiayaan menggunakan basis kas. Jadi penerimaan pembiayaan diakui pada saat uang diterima kas daerah dan pengeluaran pembiayaan diakui ketika uang keluar dari kas daerah”.

Beliau menambahkan bahwa:

”Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Sedangkan untuk pengukurannya berdasarkan nilai nominal dari transaksi”.

5. Pengakuan dan pengukuran aset daerah

Untuk pengungkapan dan pengukuran aset Daerah Kota Baubau, Bapak Budiman menjelaskan bahwa:

“Aset itu diakui pada saat manfaat ekonomi itu sudah menjadi hak milik dan lebih kuat apabila kepemilikan atau haknya itu beralih atau berpinda. Untuk aset tetap yang dibeli akan dicatat sebagai aset dan kas yang dikeluarkan untuk membayar. Transaksi ini akan dicatat dalam LRA sebagai belanja modal”.

6. Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban Daerah Kota Baubau

Menurut Bapak Budiman mengenai kewajiban beliau menjelaskan bahwa:

“Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. kalau utang itu ada dua macam yaitu utang jangka panjang sama utang jangka pendek. Pengakuan kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima atau kewajiban timbul dan diukur dengan nilai nominal. beliau menambahkan bahwa Kota Baubau telah menaati peraturan pemerintah”.

7. Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas Daerah Kota Baubau

Bapak Budi menjelaskan bahwa menurutnya:

“Ekuitas sama halnya dengan nilai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban. Itu yang disebut ekuitas. Untuk pengukuran sama pengakuannya, kita telah sama dengan PSAP. Bahwa ekuitas diakui berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. Kalau penyajiannya disajikan dalam neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)”.

4.1.3 Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Baubau Tahun 2019-2020 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

No	Unsur	Pp No. 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Pemerintah Kota Baubau Tahun 2019-2020	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
Laporan Realisasi Anggaran						
1.	Penyajian informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan.	PSAP 02 paragraf 8 laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang masing-masing di perbandingkan dengan anggaran dalam satu periode.	Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.	✓		
2.	Penyajian informasi nama entitas, cakupan entitas, periode yang dicakup mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan .	PSAP 02 paragraf 9 Laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: a. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya; b. Cakupan entitas pelaporan c. Periode yang dicakup d. Mata uang pelaporan; dan e. Satuan angka yang digunakan.	Laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: a. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya; b. Cakupan entitas pelaporan c. Periode yang dicakup d. Mata uang pelaporan; dan e. Satuan angka yang digunakan	✓		

4.2 Pembahasan

4.2.3 Evaluasi Makna Basis Akruwal dalam Pemerintah Kota Baubau: Kompleksitas Laporan Keuangan

Dari analisis yang diungkapkan di atas dapat diambil garis besarnya bahwa Pemerintah Kota Baubau telah melakukan persiapan-persiapan dan strategi yang matang sehingga tercipta keberhasilan dalam mengimplementasi Basis Akruwal dengan baik, terbukti dengan diperolehnya Opini Dari BPK 6 kali berturut-turut setelah menerapkan SAP Basis Akruwal. Jadi, dapat dikatakan bahwa peraturan pemerintah apa yang berlaku saat ini maka peraturan tersebut yang akan diikuti oleh pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Baubau.

Hal ini merupakan contoh yang baik yang dapat dilihat dari sektor publik, bahwa setiap ada perubahan peraturan maka pemerintah daerah yang dikoordinasi oleh pemerintah pusat wajib melaksanakan peraturan baru tersebut karena adanya nilai kepatuhan terhadap hukum. Nilai kepatuhan terhadap hukum tersebut mendorong tindakan pemerintah Kota Baubau untuk senantiasa mengikuti aturan main dari standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku saat ini yaitu SAP berbasis akruwal.

4.2.4 Evaluasi Perlakuan Akuntansi pada LKPD Kota Baubau Tahun Anggaran 2019-2020 Terkait Penerapan PP 71/ 2010 Basis Akruwal : Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan dalam penerapan SAP Akruwal.

1. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO Daerah Kota Baubau

Dalam BPKAPD Kota Baubau Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat Entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran Entitas telah diterima, dengan syarat Entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
- e. Kas atas pendapatan yang diterima Entitas lain di luar Entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

2. Pengakuan dan Pengukuran Belanja Pemerintah Kota Baubau

Dalam Peraturan Walikota Baubau No. 09 Tahun 2015 Pemerintah Kota Baubau, Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

3. Pengakuan dan pengukuran beban daerah kota baubau.

sesuai dengan peraturan walikota baubau No 09 Tahun 2015 Pemerintah Kota Baubau Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi asset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Pemerintah Kota Baubau.

Dalam Peraturan Walikota Baubau No. 09 Tahun 2015 Pemerintah Kota Baubau Pengakuan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Serta Penerimaan Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. Pengakuan dan Pengukuran Aset Daerah Kota Baubau

Menurut Peraturan Walikota Baubau No. 09 Tahun 2015 Pengakuan Kas dan Setara Kas, secara umum pengakuan aset dilakukan:pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpidah, dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

6. Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas Daerah Kota Baubau

Menurut Peraturan Walikota Baubau No. 09 Tahun 2015 Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Dan Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.2.5 Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Baubau

a. Analisa Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA;
2. Belanja; 3) Transfer;
3. Surplus/Defisit-LRA;
4. Pembiayaan;
5. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

b. Analisa Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
5. Saldo Anggaran Lebih akhir.

c. Neraca

Neraca Pemerintah Kota Baubau menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuita. Pemerintah Kota Baubau mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

d. Laporan Operasional

Laporan operasional pada LKPD Kota Baubau telah menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
2. Beban dari kegiatan operasional;
3. Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
4. Kegiatan Non Operasional;
5. Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa;
6. Pos luar biasa;
7. Surplus/defisit-LO

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode Akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas pada Pemerintahan Kota Baubau menyajikan pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar,
- d. Ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Baubau menjelaskan pos-pos Laporan Keuangan:

- a. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
- b. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.

5 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam mengevaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Baubau, dalam penelitian ini menemukan :

1. Laporan keuangan Pemerintah Kota Baubau telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal, hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Sub Bidang Pelaporan Dan Pembinaan yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Baubau telah menerapkan SAP Basis Akruwal sejak tahun 2015, sesuai dengan aturan dalam PP 71/2010.
2. Pemerintah Kota Baubau telah menyajikan 7 komponen laporan keuangan yaitu : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Yang digunakan dalam menyusun LKPD yakni Basis Akruwal.
3. Perlakuan akuntansi pada LKPD Kota Baubau tahun anggaran 2019-2020 terkait penerapan PP 71/2010 basis akruwal telah sesuai untuk pengakuan, pengukuran dan penyajian pos-pos dalam neraca. Hanya saja untuk pencatatan Persediaan Pemerintah Kota Baubau tidak menggunakan metode Perpetual melainkan menggunakan metode Fisik. Pencatatan tersebut tidak menyalahi aturan dalam PSAP, hanya saja mengurangi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Baubau.

6. SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian, hal-hal yang disarankan adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya dalam pencatatan Persediaan pada Pemerintah Kota Baubau menggunakan metode Perpetual, agar bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Baubau.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk melakukan Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Kota Baubau dari Tahun 2019-2020, karena Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal dimulai dari tahun 2015.

7. DAFTAR PUSTAKA

Adhi, D. K., dan Suhardjo, Y. 2013. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintah kota Tual)*. Jurnal STIE Semarang (Edisi Elektronik), Vol. 5, No. 3, Hal. 93-111.

Anonim, 2014. *Modul Bimbingan Teknis Implementasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akruwal Tingkat Kantor Satker di Lingkungan. Kementerian. Perhubungan*. Jakarta : Kementerian Perhubungan RI.

- Astuti, Y. L. 2017. *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruaal pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Ferryono, B., & Sutaryo, S. (2017). *Manfaat Akuntansi Basis Akruaal dan Akuntansi Basis Kas Menuju Akruaal dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah*. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol. 4, No. 2, Hal. 143-158.
- Firdaus, D., Sayogo, D. S., dan Latifah, S. W. 2015. *Evaluasi Penerapan PP No 71/2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruaal: Studi Kasus di Pemda Nganjuk*. Journal of Accounting and Investment, Vol. 16, No. 1, Hal. 25-32.
- Ikhsan, Arfan, dk. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Citrapusta Media: Bandung.
- Ilmiyati, F., dan Suhardjo, Y. 2012. *Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi auditor terhadap kualitas audit*. Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 1.
- Indonesia, R. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Peraturan Pemerintah, 71.
- KSAP. 2012. *Standar Akuntansi Pemerintahan : Peraturan .Pemerintah .Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010*. Jakarta : Salemba Empat
- Laughin. 2013. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akruaal*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mahsun, dkk. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Cetakan Kelima Yogyakarta : Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM.
- Manangkalangi, K. M. 2013. *Analisis Penyajianlaporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Vol. 1, No. 3.
- Mentu, E. P., dan Sondakh, J. J. 2016. *Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Prov. Sulut*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Vol. 4, No. 1.
- Rahayu, S. 2014. *Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akruaal dan SAP Berbasis Kas Menuju Akruaal di Jombang*.
- Ratmono Dwi dan Sholihin Mahfud, 2015, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akruaal*, Cetakan Pertama, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogkakarta
- Roring, H. S. 2019. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Berbasis Akruaal Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Vol. 7, No. 4.

Silaen, S. 2018. *Metodologi penelitian Social Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bandung: In Media.